

AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE NEW NATIONAL CAPITAL CITY (IKN) REGION: A MULTI- STAKEHOLDER PERSPECTIVE

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA (IKN) BARU: PERSPEKTIF MULTI- STAKEHOLDER

Rianda Abdi¹, Ismail Mahmud², Afdil Hafidh³, Nurul Kamaliah Umasangaji⁴

^{1,2,3,4} Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email Correspondence: nkumasangaji@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT:

The relocation of Indonesia's new capital (IKN) to East Kalimantan presents both opportunities and challenges for the agricultural sector as the foundation of national food security. Agricultural development in this emerging region requires an integrated approach, as food security depends not only on land availability and production capacity but also on supply stability, farmers' access to inputs, and the long-term sustainability of local production systems. This article analyzes agricultural development strategies in the IKN area and its surrounding regions through a multi-stakeholder perspective involving government, farmers, academics, and students. Using a descriptive qualitative method, data were obtained from a multi-stakeholder dialogue forum in Muara Ulu Jawa Village, Samboja District, as well as secondary data from government documents and academic sources. The findings reveal several key challenges, including limited productive land due to land conversion, shortages of subsidized fertilizers, insufficient agricultural extension officers, and inadequate farm road infrastructure. Stakeholders emphasized the need for farmland protection policies, improved fertilizer distribution, reclamation of former mining sites for new agricultural land, development of irrigation and farm roads, strengthening GAPOKTAN institutions, and increasing extension personnel. Local leaders also highlighted the urgency for IKN to achieve localized food self-sufficiency, considering that East Kalimantan currently meets only 30% of its food needs. Proposed strategies include increasing production, expanding farmland, modernizing agricultural equipment, stabilizing farm-gate prices, and enhancing farmers' human resource capacity. Academics and students are expected to support farmer adaptation through knowledge transfer, field assistance, and applied research. This study concludes that agricultural development in IKN requires integrated, sustained collaboration among farmers, local governments, the IKN Authority, and universities to align production needs, input access, farmer welfare, and land protection. Such collaboration can position IKN's agriculture as a long-term food security model for Eastern Indonesia.

Keywords: *Agricultural Development in IKN, Food Security, Multi-Stakeholder Collaboration, Farmland Protection, East Kalimantan*

ABSTRAK:

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membuka peluang sekaligus tantangan bagi sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pembangunan pertanian di kawasan baru ini memerlukan pendekatan terintegrasi karena ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan lahan dan produksi, tetapi juga stabilitas pasokan, akses input, dan keberlanjutan jangka panjang. Artikel ini menganalisis strategi pembangunan pertanian di kawasan IKN dan wilayah penyangganya melalui perspektif multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, petani, akademisi, dan mahasiswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui forum dialog multi-pihak di Desa Muara Ulu Jawa, Kecamatan Samboja, serta data sekunder dari dokumen resmi pemerintah dan sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama berupa keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi, kelangkaan pupuk bersubsidi, minimnya penyuluh aktif, dan akses jalan pertanian yang terbatas. Stakeholder menekankan perlunya perlindungan lahan, perbaikan distribusi pupuk, reklamasi lahan eks-tambang, pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, penguatan kelembagaan GAPOKTAN, serta penambahan penyuluh. Pandangan tokoh daerah menegaskan kebutuhan IKN untuk mandiri pangan dengan suplai lokal, di tengah kemampuan Kalimantan Timur yang baru memenuhi 30% kebutuhan pangan. Usulan strategi mencakup peningkatan produksi, perluasan lahan, modernisasi alat pertanian, stabilisasi harga, serta peningkatan kapasitas SDM petani. Akademisi dan mahasiswa diharapkan berperan dalam pendampingan, transfer pengetahuan, dan riset terapan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan pertanian IKN membutuhkan integrasi antar-aktor melalui forum tetap untuk menyelaraskan kebutuhan produksi, akses input, keberlanjutan ekonomi petani, dan perlindungan lahan. Dengan kolaborasi berkelanjutan, pertanian IKN berpotensi menjadi model ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia Timur.

Kata Kunci: *Pembangunan Pertanian IKN, Ketahanan Pangan, Kolaborasi Multi-Aktor, Perlindungan Lahan, Kalimantan Timur*

Article Info

Received : 01 May 2026

Accepted	:	22 May 2026
Published	:	26 May 2026
DOI	:	https://doi.org/10.30872/psd.v7i1.199

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada aspek administratif pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan besar terhadap struktur sosial, ekonomi, tata ruang, dan ekologi wilayah. Perpindahan pusat pemerintahan ke kawasan baru diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kebutuhan infrastruktur, serta permintaan pangan dalam skala besar. Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting karena keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur fisik, tetapi juga kemampuan wilayah dalam menjamin ketersediaan, akses, stabilitas, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakatnya (FAO et al., 2023).

Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN masih menghadapi tantangan serius dalam sektor pangan. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur baru mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan pangannya secara mandiri, sementara sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Persoalan ini mencerminkan tantangan strategis karena peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan. Ketergantungan pasokan dari luar daerah berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap gangguan distribusi, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan pasokan pangan di masa depan.

Di sisi lain, pembangunan kawasan IKN juga memunculkan tekanan baru terhadap sektor pertanian di wilayah penyangga. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi baru semakin meningkat seiring percepatan pembangunan kota. Namun, persoalan ketahanan pangan di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan pertanian. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa petani di wilayah penyangga juga menghadapi berbagai persoalan lain seperti kelangkaan pupuk bersubsidi, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, lemahnya kelembagaan petani, fluktuasi harga hasil panen, keterbatasan infrastruktur jalan usaha tani, hingga belum adanya kepastian pasar bagi hasil produksi lokal. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di kawasan IKN bersifat multidimensional dan melibatkan banyak aktor lintas sektor.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pembangunan IKN dari berbagai perspektif, seperti perubahan tata guna lahan, konflik agraria, pembangunan berkelanjutan, serta implikasi pembangunan IKN terhadap sektor pertanian. Penelitian Collaborative Governance oleh Ansell and Gash (2008) menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian persoalan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sementara itu, studi Food and Agriculture Organization menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi pangan, tetapi juga akses, stabilitas distribusi, dan keberlanjutan sistem pangan (Food & Organization, 2021). Penelitian lain terkait IKN lebih banyak berfokus pada isu alih fungsi lahan, proyeksi kebutuhan pangan, dan pembangunan kawasan secara makro. Namun demikian, kajian mengenai strategi pembangunan pertanian berbasis kolaborasi multi-stakeholder yang mengintegrasikan perspektif ketahanan pangan, tata kelola kolaboratif, dan keberlanjutan pertanian di wilayah penyangga IKN masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum banyaknya penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana pembangunan pertanian di kawasan IKN dapat dikelola melalui pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, Otorita IKN, kelompok tani, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal dalam kerangka ketahanan pangan berkelanjutan. Padahal, pembangunan pertanian di kawasan penyangga IKN memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar mampu menjawab tantangan produksi pangan, perlindungan lahan, distribusi input pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan stabilitas pasar secara bersamaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan pertanian di kawasan IKN dan wilayah penyangganya melalui perspektif multi-stakeholder. Penelitian ini menawarkan novelty berupa model kolaborasi pembangunan pertanian yang mengintegrasikan pendekatan Collaborative Governance, konsep ketahanan pangan Food and Agriculture Organization, dan pembangunan pertanian berkelanjutan dalam konteks wilayah penyangga IKN. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan IKN maupun wilayah berkembang lainnya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus partisipatif untuk memahami dinamika pembangunan pertanian di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah penyangganya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta interaksi antar-aktor yang terlibat dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di kawasan IKN. Sementara itu, desain partisipatif digunakan karena isu pertanian di wilayah penyangga IKN melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda-beda sehingga membutuhkan ruang dialog bersama untuk memahami persoalan secara komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Desa Muara Ulu Jawa, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu wilayah penyangga IKN dengan aktivitas pertanian pangan dan hortikultura yang cukup aktif. Wilayah ini dipilih karena mengalami tekanan pembangunan akibat ekspansi kawasan IKN sekaligus memiliki posisi strategis sebagai daerah penopang kebutuhan pangan kawasan inti pemerintahan baru.

Data primer diperoleh melalui forum dialog multi-stakeholder yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025. Forum ini melibatkan berbagai aktor yang berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian di kawasan IKN, meliputi unsur pemerintah daerah, Otorita IKN, kelompok tani, GAPOKTAN, akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, partisipan dalam forum berjumlah 18 orang yang terdiri atas 8 petani dan anggota kelompok tani, 2 perwakilan GAPOKTAN, 2 perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, 1 perwakilan Otorita IKN, 2 akademisi, serta 3 mahasiswa pendamping lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. observasi lapangan terhadap kondisi pertanian dan infrastruktur wilayah penyangga IKN;
2. forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) multi-stakeholder;
3. wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci; dan
4. dokumentasi berupa notulensi, foto kegiatan, dan dokumen kebijakan terkait pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, publikasi Kementerian Pertanian RI, serta berbagai artikel ilmiah dan laporan internasional terkait ketahanan pangan, collaborative governance, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan tiga kerangka utama. Pertama, teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell and Gash (2008) untuk menganalisis pola koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian IKN. Kedua, konsep ketahanan pangan Food and Agriculture Organization yang menekankan empat dimensi utama, yaitu availability, access, stability, dan utilization (FAO, 2021). Ketiga, konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang digunakan untuk memahami keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam sistem pertanian kawasan penyangga IKN.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti mengelompokkan berbagai temuan berdasarkan tema-tema utama seperti masalah lahan, distribusi pupuk, infrastruktur pertanian, kelembagaan petani, serta pemasaran hasil pertanian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data melalui narasi deskriptif dan pemetaan hubungan antar-aktor. Setelah itu, dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap teori collaborative governance, ketahanan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, forum diskusi, serta data sekunder dari berbagai dokumen resmi dan literatur akademik. Pendekatan ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang lebih kuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kawasan Penyangga IKN*

Hasil forum dialog multi-stakeholder menunjukkan bahwa pembangunan kawasan IKN telah meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif di wilayah penyangga, khususnya di Desa Muara Ulu Jawa Kecamatan Samboja. Para petani menyampaikan bahwa sebagian lahan sawah dan hortikultura mulai mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman, jalan, dan infrastruktur pendukung pembangunan kota baru. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya nilai ekonomi lahan akibat ekspansi pembangunan IKN.

Selain itu, sebagian besar petani di wilayah penelitian tidak memiliki kepastian kepemilikan lahan karena masih menggunakan sistem sewa atau pengelolaan lahan kavling. Temuan lapangan mengkonfirmasi bahwa petani berada pada posisi rentan terhadap perubahan tata ruang dan spekulasi harga tanah. Ketidakpastian kepemilikan lahan juga berdampak pada rendahnya keberanian petani untuk melakukan investasi jangka panjang seperti pengembangan irigasi, diversifikasi tanaman, maupun modernisasi pertanian.

Beberapa peserta forum juga menilai bahwa pembangunan IKN belum sepenuhnya mengintegrasikan perlindungan lahan pertanian ke dalam perencanaan kawasan. Petani khawatir bahwa jika konversi lahan terus berlangsung, maka kapasitas produksi pangan lokal akan semakin menurun dan meningkatkan ketergantungan IKN terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pertanian di kawasan penyangga IKN tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ruang produksi pertanian itu sendiri. Dalam perspektif ketahanan pangan Food and Agriculture Organization, keberadaan lahan produktif merupakan bagian penting dari dimensi availability atau ketersediaan pangan. Penurunan luas lahan pertanian secara langsung akan mempengaruhi kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ketika produksi lokal menurun akibat alih fungsi lahan, maka risiko kerentanan pangan akan semakin besar, terutama di tengah peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan kota baru dan pembangunan sistem pangan seharusnya dipandang sebagai agenda yang saling berkaitan, bukan berjalan secara terpisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi *Land Use Change* yang menjelaskan bahwa urbanisasi dan pembangunan kawasan metropolitan baru seringkali menjadi faktor utama penyusutan lahan pertanian di wilayah peri-urban (Seto et al., 2012; Zasada, 2021). Penelitian sebelumnya terkait pembangunan IKN juga menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan berpotensi menimbulkan konflik antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan sistem pangan lokal.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, persoalan alih fungsi lahan tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan sektoral semata. Perlindungan lahan pertanian memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Otorita IKN, DPRD, kelompok tani, dan masyarakat lokal dalam menentukan zonasi pertanian berkelanjutan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan produksi pangan lokal.

Berdasarkan hasil diskusi multi-stakeholder, salah satu strategi yang diusulkan adalah penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di wilayah penyangga IKN. Selain itu, pemanfaatan lahan eks-tambang sebagai lahan pertanian baru juga dipandang sebagai alternatif untuk menjaga kapasitas produksi pangan di tengah keterbatasan lahan produktif. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga perlindungan ruang hidup petani dan keberlanjutan ekologis wilayah.

3.2. *Ketersediaan Input dan Modernisasi Pertanian*

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan pupuk masih menjadi keluhan utama petani di wilayah penyangga IKN. Petani menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan produksi. Selain itu, terjadi kenaikan harga pupuk dari sekitar Rp115.000 menjadi Rp130.000 per sak yang semakin meningkatkan biaya produksi pertanian.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan secara optimal, terutama pada musim tanam yang membutuhkan input tinggi. Beberapa petani bahkan mengurangi luas tanam karena keterbatasan modal untuk membeli pupuk non-subsidi. Selain persoalan pupuk, petani juga

mengeluhkan keterbatasan alat dan mesin pertanian. Sebagian besar proses produksi masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih besar.

Dalam forum diskusi, petani berharap adanya perbaikan distribusi pupuk, bantuan alat pertanian modern, serta dukungan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Akademisi dan mahasiswa juga menyoroti pentingnya transfer teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan petani lokal, seperti sistem irigasi hemat air, alat tanam semi-mekanis, dan teknologi pemantauan kondisi tanah.

Persoalan pupuk dan keterbatasan teknologi menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pertanian di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan lahan, tetapi juga menyangkut akses terhadap input produksi dan modernisasi sistem pertanian. Dalam perspektif ketahanan pangan FAO, akses terhadap pupuk, benih, teknologi, dan sarana produksi merupakan bagian penting dari dimensi access. Ketika petani tidak memperoleh akses input secara memadai, maka kapasitas produksi pangan lokal akan mengalami penurunan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa distribusi pupuk di wilayah penyangga IKN masih menghadapi persoalan koordinasi antar lembaga. Distribusi pupuk melibatkan pemerintah daerah, distributor, kelompok tani, hingga pemerintah pusat sehingga seringkali menimbulkan keterlambatan dan ketidaksesuaian kuota. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem distribusi input pertanian masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara efektif.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, persoalan distribusi pupuk membutuhkan mekanisme koordinasi lintas aktor agar kebutuhan petani dapat dipetakan secara lebih akurat. Penguatan kelembagaan GAPOKTAN menjadi penting karena kelompok tani dapat berfungsi sebagai simpul distribusi lokal sekaligus penghubung antara petani dan pemerintah (White, 2012). Kelembagaan yang kuat juga dapat membantu meningkatkan transparansi distribusi dan mengurangi ketimpangan akses terhadap pupuk bersubsidi.

Selain persoalan input, keterbatasan modernisasi pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah penyangga IKN masih menghadapi kesenjangan teknologi. Penggunaan alat manual menyebabkan proses produksi kurang efisien dan meningkatkan ketergantungan terhadap tenaga kerja pertanian yang jumlahnya semakin terbatas. Padahal, pembangunan IKN akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam jumlah besar sehingga diperlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian *Agricultural Innovation Systems* yang menekankan bahwa inovasi pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada interaksi antara pemerintah, petani, akademisi, dan lembaga pendukung lainnya. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai knowledge broker yang menjembatani kebutuhan petani dengan pengembangan teknologi tepat guna.

Melalui forum dialog, beberapa strategi yang diusulkan meliputi perbaikan distribusi pupuk berbasis data kelompok tani, penguatan fungsi GAPOKTAN, bantuan alat pertanian modern, serta pengembangan program pendampingan teknologi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan pemberdayaan petani secara bersamaan.

3.3. *Infrastruktur Pertanian dan Distribusi Pangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pertanian di wilayah penyangga IKN masih belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Petani menyampaikan bahwa beberapa akses jalan menuju lahan pertanian mulai terganggu akibat pembangunan kawasan perumahan dan proyek infrastruktur baru di sekitar wilayah IKN. Beberapa jalan tani bahkan mengalami penyempitan dan kerusakan sehingga menyulitkan mobilitas alat pertanian maupun distribusi hasil panen.

Selain persoalan jalan usaha tani, petani juga mengeluhkan keterbatasan saluran irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pascapanen. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan meningkatkan risiko kerusakan hasil pertanian, terutama untuk komoditas hortikultura yang membutuhkan penanganan cepat. Dalam forum dialog, petani berharap pemerintah daerah dan Otorita IKN dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur pertanian secara lebih serius agar sektor pertanian tidak terpinggirkan oleh percepatan pembangunan kawasan perkotaan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan IKN belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan sektor pertanian di wilayah penyangga. Padahal, infrastruktur pertanian merupakan faktor penting dalam menjaga efisiensi produksi dan distribusi pangan. Dalam perspektif ketahanan pangan FAO, keberadaan jalan usaha tani, irigasi, dan fasilitas distribusi berkaitan erat dengan dimensi access dan stability karena menentukan kelancaran arus input maupun hasil produksi pangan.

Keterbatasan infrastruktur pertanian dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya menurunkan daya saing hasil pertanian lokal. Situasi ini menjadi tantangan serius karena pembangunan IKN diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam jumlah besar. Jika distribusi

pangan lokal tidak didukung infrastruktur yang memadai, maka ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya fragmentasi kebijakan antara pembangunan kawasan perkotaan dengan pembangunan pertanian. Pembangunan jalan, kawasan perumahan, dan infrastruktur kota seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan akses petani terhadap lahan produksi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi perencanaan tata ruang antara sektor pertanian dan pembangunan kawasan IKN.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, pembangunan infrastruktur pertanian memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dinas teknis, pemerintah desa, dan kelompok tani. Infrastruktur pertanian tidak dapat dipandang sekadar sebagai proyek fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem pangan yang mendukung keberlanjutan produksi lokal. Oleh karena itu, proses perencanaan infrastruktur perlu melibatkan petani dan masyarakat lokal agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi pembangunan pertanian berkelanjutan yang menekankan pentingnya infrastruktur dasar sebagai penopang sistem pangan lokal (World Bank, 2020). Jalan usaha tani, irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pascapanen berfungsi menjaga efisiensi distribusi, mengurangi kehilangan hasil panen, dan meningkatkan stabilitas pasokan pangan.

Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan meliputi pembangunan jalan usaha tani khusus, pengembangan irigasi berbasis konservasi air, penyediaan gudang penyimpanan hasil pertanian, serta pembangunan fasilitas pascapanen di wilayah penyangga IKN. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan IKN agar sektor pertanian tetap mampu menopang ketahanan pangan jangka panjang.

3.4. Kelembagaan Petani dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa kelembagaan petani di wilayah penyangga IKN masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kapasitas organisasi maupun keberlanjutan regenerasi petani. Beberapa kelompok tani dan GAPOKTAN telah terbentuk, namun belum seluruhnya berfungsi optimal dalam pengelolaan produksi, distribusi informasi, maupun akses terhadap bantuan pemerintah. Sebagian besar kelompok tani masih bergantung pada pendampingan dari pemerintah daerah dan belum memiliki kemampuan manajerial yang kuat.

Selain itu, petani juga menyampaikan kekhawatiran terhadap menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Pembangunan IKN membuka peluang kerja baru di sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pertanian mulai mengalami keterbatasan tenaga kerja produktif, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan intensitas kerja tinggi.

Dalam forum diskusi, akademisi dan pemerintah daerah menilai bahwa penguatan kapasitas kelembagaan petani menjadi kebutuhan mendesak agar petani mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi akibat pembangunan IKN. Beberapa peserta forum juga menekankan pentingnya program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknologi bagi petani muda untuk mendorong regenerasi sektor pertanian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pertanian di kawasan penyangga IKN tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kapasitas sosial kelembagaan petani. Dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, kelembagaan petani memiliki peran penting sebagai sarana penguatan kapasitas kolektif, distribusi informasi, dan pengembangan jejaring produksi maupun pemasaran.

Kelemahan kelembagaan petani dapat menyebabkan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pembangunan. Ketika pembangunan IKN berlangsung secara cepat, petani membutuhkan organisasi yang mampu memperkuat posisi tawar mereka terhadap pasar, pemerintah, maupun perubahan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, kelompok tani dan GAPOKTAN tidak hanya berfungsi sebagai penerima bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai ruang pengorganisasian sosial masyarakat pertanian.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan petani dalam forum dialog dan perencanaan pembangunan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat top-down. Collaborative governance menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses tata kelola, bukan sekadar objek kebijakan pembangunan.

Persoalan regenerasi petani juga menjadi isu penting dalam konteks pembangunan IKN. Urbanisasi dan ekspansi ekonomi kawasan perkotaan berpotensi menarik tenaga kerja muda keluar dari sektor pertanian. Jika

kondisi tersebut terus berlangsung, maka keberlanjutan produksi pangan lokal akan menghadapi ancaman jangka panjang akibat berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi *Rural Sociology* yang menjelaskan bahwa transformasi wilayah perkotaan seringkali menyebabkan perubahan orientasi pekerjaan generasi muda pedesaan. Pertanian dianggap kurang menarik karena memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil dan membutuhkan kerja fisik yang tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian di kawasan IKN perlu disertai upaya peningkatan nilai ekonomi pertanian dan modernisasi sistem produksi agar sektor pertanian tetap memiliki daya tarik bagi generasi muda serta membuka ruang regenerasi petani muda, pembelajaran lintas generasi, serta lahirnya inovasi teknologi berbasis konteks lokal (White, 2012).

Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan antara lain penguatan kapasitas kelompok tani, pelatihan kewirausahaan pertanian, pengembangan pertanian berbasis teknologi, serta peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat tani. Selain itu, program regenerasi petani muda dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di wilayah penyangga IKN. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memerlukan penguatan aspek sosial kelembagaan secara bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian.

3.5. Stabilitas Harga dan Kepastian Pasar Hasil Pertanian

Hasil forum dialog menunjukkan bahwa persoalan pemasaran hasil pertanian masih menjadi tantangan utama bagi petani di wilayah penyangga IKN. Petani menyampaikan bahwa harga hasil panen sering mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran. Ketika produksi meningkat pada musim panen, harga jual cenderung turun secara signifikan sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

Selain fluktuasi harga, petani juga menghadapi keterbatasan akses pasar yang stabil. Sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan melalui tengkulak atau pedagang perantara sehingga posisi tawar petani relatif rendah. Dalam beberapa kasus, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan risiko kerusakan produk pertanian yang tidak tahan lama.

Pembangunan IKN sebenarnya dipandang sebagai peluang pasar baru bagi sektor pertanian lokal. Namun, petani menilai bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai integrasi hasil pertanian lokal ke dalam rantai pasok pangan IKN. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kebutuhan pangan kawasan IKN justru akan lebih banyak dipenuhi dari luar daerah dibandingkan dari wilayah penyangga lokal.

Dalam forum diskusi, beberapa peserta mengusulkan perlunya kebijakan afirmatif yang memberikan ruang bagi produk pertanian lokal untuk masuk ke pasar IKN. Selain itu, penguatan koperasi tani, pengembangan pasar lokal, dan kemitraan dengan pelaku usaha pangan dipandang penting untuk meningkatkan kepastian pasar bagi petani.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas pasar dan keberlanjutan ekonomi petani. Dalam perspektif ketahanan pangan FAO, stabilitas harga dan kepastian distribusi merupakan bagian penting dari dimensi stability. Ketika harga hasil pertanian tidak stabil, maka keberlanjutan produksi pangan lokal juga akan terganggu karena petani kehilangan insentif ekonomi untuk mempertahankan usaha pertaniannya.

Fluktuasi harga yang terjadi di wilayah penyangga IKN menunjukkan bahwa sistem pemasaran hasil pertanian masih belum terintegrasi secara kuat. Ketergantungan terhadap tengkulak menyebabkan petani memiliki posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga jual hasil panen. Selain itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi membuat petani sulit mempertahankan kualitas produk dalam waktu yang lebih lama.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan IKN seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan permintaan pangan, tetapi juga membangun sistem rantai pasok pangan lokal yang inklusif. Jika kebutuhan pangan IKN lebih banyak dipenuhi dari luar daerah, maka wilayah penyangga akan kehilangan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, penguatan pasar pertanian memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Otorita IKN, koperasi petani, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi petani dari ketidakstabilan harga, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui pengembangan kemitraan distribusi pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian *Food Supply Chain Management* yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pangan perkotaan sangat dipengaruhi oleh integrasi rantai pasok lokal (Hobbs, 2020). Kota baru yang berkembang pesat membutuhkan sistem distribusi pangan yang efisien, stabil, dan mampu melibatkan produsen lokal agar manfaat ekonomi pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Melalui forum multi-stakeholder, beberapa strategi yang diusulkan meliputi penguatan koperasi tani, pengembangan pasar pangan lokal, pembangunan fasilitas penyimpanan hasil panen, serta penyusunan kebijakan afirmatif bagi produk pertanian lokal untuk masuk ke rantai pasok pangan IKN. Selain itu, digitalisasi pemasaran pertanian melalui platform daring juga dipandang sebagai peluang untuk memperluas akses pasar petani. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan kawasan IKN memerlukan integrasi antara aspek produksi, distribusi, dan keberlanjutan ekonomi petani lokal.

3.6 Model Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pembangunan Pertanian IKN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan penyangga IKN melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan program pertanian dan penyediaan bantuan teknis, Otorita IKN berperan dalam kebijakan pembangunan kawasan, kelompok tani berfungsi sebagai pelaku produksi pangan, sementara perguruan tinggi dan mahasiswa berkontribusi dalam pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Forum dialog yang dilaksanakan dalam penelitian ini menjadi ruang komunikasi antar-aktor untuk membahas berbagai persoalan pertanian di wilayah penyangga IKN. Melalui forum tersebut, para peserta dapat menyampaikan masalah, kebutuhan, dan usulan solusi secara langsung. Beberapa peserta forum menilai bahwa selama ini koordinasi antar lembaga masih berjalan parsial sehingga program pertanian belum terintegrasi secara optimal.

Selain itu, petani juga menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan masih terbatas. Sebagian kebijakan pertanian dianggap masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, forum kolaboratif dipandang penting sebagai media komunikasi dan pengambilan keputusan bersama dalam pembangunan pertanian kawasan IKN.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Berbagai persoalan seperti alih fungsi lahan, distribusi pupuk, infrastruktur, regenerasi petani, dan stabilitas pasar saling berkaitan dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan *Collaborative Governance* dalam tata kelola pembangunan pertanian kawasan IKN.

Menurut Ansell and Gash (2008), *collaborative governance* menekankan proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah secara kolektif dalam penyelesaian masalah publik. Dalam konteks penelitian ini, forum multi-stakeholder menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembangunan kepercayaan, dan penyusunan solusi bersama antar aktor yang terlibat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Peserta forum menilai bahwa pembangunan IKN jangan sampai “mengorbankan ruang hidup petani lokal” sehingga ketika komunikasi antar lembaga berjalan lemah, maka berbagai program pembangunan cenderung berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kolaborasi yang kuat dapat membantu menyatukan sumber daya, memperkuat koordinasi program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi *Participatory Development* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, konflik kepentingan, dan rendahnya efektivitas program pembangunan. Oleh sebab itu, pendekatan partisipatif menjadi penting agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, model kolaborasi pembangunan pertanian di kawasan IKN dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. penguatan forum komunikasi multi-stakeholder secara berkala;
2. integrasi kebijakan pertanian antara pemerintah daerah dan Otorita IKN;
3. penguatan kelembagaan petani dan koperasi lokal;
4. peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendampingan dan inovasi teknologi;
5. perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; serta
6. pengembangan sistem rantai pasok pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan kawasan IKN.

Model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).

4. KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur membawa implikasi besar terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah penyangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan di kawasan IKN tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan pertanian, tetapi juga mencakup persoalan distribusi pupuk, keterbatasan infrastruktur pertanian, lemahnya kelembagaan petani, regenerasi sumber daya manusia pertanian, hingga ketidakstabilan pasar hasil pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan pangan di kawasan IKN bersifat multidimensional dan berkaitan dengan aspek availability, access, dan stability dalam sistem ketahanan pangan.

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan pertanian di kawasan IKN memerlukan pendekatan multi-stakeholder melalui penguatan *collaborative governance* antara pemerintah daerah, Otorita IKN, kelompok tani, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, memperbaiki infrastruktur pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta membangun rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan perkotaan, tetapi juga perlu memperhatikan keberlanjutan sistem pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada kelompok tani, GAPOKTAN, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, akademisi, mahasiswa, serta seluruh peserta forum dialog multi-stakeholder di Desa Muara Ulu Jawa Kecamatan Samboja. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi (2024)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy>
- Bappenas. (2021). *Indonesia strategic national pathway for food systems transformation*. https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/Pathway_version_1.0english_Indonesia_15.09.2021.pdf
- Busari, A. (2025). Navigating a sustainable agricultural economy in Indonesia's new capital city. *Sustinere Journal of Environment and Sustainability*. <https://www.researchgate.net/publication/394881742>
- Chowdhury, M. R., et al. (2023). The role of digital agriculture in transforming rural areas into smart villages. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2301.10012>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- FAO. (2006). *Food security: Concept and measurement*. FAO Policy Brief. https://www.fao.org/fileadmin/templates/faitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Coept_Note.pdf
- FAO. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Rome: FAO.
- FAO & Pemerintah Indonesia. (2021–2025). *Country Programming Framework (CPF) Indonesia*. <https://www.fao.org/indonesia/resources/publications/en>
- Hall, A., Mytelka, L., & Oyeyinka, B. (2006). *Agricultural innovation systems: An investment sourcebook*. World Bank.
- Hobbs, J. E. (2020). Food supply chains during the COVID-19 pandemic. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 68(2), 171–176.
- Iemaiah, Z. M. (2023). Landuse changes and policy directions for agriculture. *GEA: Geografi dan Lingkungan*. <https://vm36.upi.edu/index.php/gea/article/view/61629>
- Kanojia, M., et al. (2023). Alternative agriculture land-use transformation pathways by partial-equilibrium agricultural sector model: A mathematical approach. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2308.11632>
- Kementerian Pertanian RI. (2025). *Outlook Komoditas Tanaman Pangan – Padi 2024*. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Padi_2024_Final.pdf

-
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024). *Rencana Strategis OIKN 2020–2024*. <https://ikn.go.id/storage/galleries/20240619-perka-oikn-3-tahun-2024.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207619/perpres-no-63-tahun-2022>
- Purwandaya, B. (2025). Rice deficit projections for Indonesia's new capital (IKN) region. *Research on World Agricultural Economy*, 6(3). <https://journals.nasspublishing.com/index.php/rwae/article/download/1981/1114>
- Sachs, J. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *PNAS*, 109(40), 16083–16088.
- Scoones, I. (2016). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Suanda, I. W. (2020). *Pertanian berkelanjutan*. Universitas Pendidikan Ganesha Press. <https://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/2041/>
- Susilowati, S. H. (2016). Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 35–55.
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land*, 13(5), 606. <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- White, B. (2012). Agriculture and the generation problem: Rural youth, employment and the future of farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9–19.
- Yofa, R. D., Irawan, A. R., & Sudaryanto, T. (2023). The development of Indonesian new state capital (IKN) and its implications for the agricultural sector. *FFTC Agricultural Policy Platform*. <https://ap.ffc.org.tw/article/3484>
- Yonariza, I. (n.d.). *Pembangunan pertanian berkelanjutan dalam perspektif Indonesia*. Universitas Andalas. <https://faperta.unand.ac.id/unduh>
- World Bank. (2020). *Harvesting prosperity: Technology and productivity growth in agriculture*. Washington DC: World Bank.
- Zasada, I. (2021). Multifunctional peri-urban agriculture—A review of societal demands and the provision of goods and services by farming. *Land Use Policy*, 100.